



E-ISSN: 2723-3731

Jawa Dwipa
Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu
Volume 6 Nomor 1 Juni 2025

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSRENBANGKEL DI KELURAHAN KARANGREJO BANYUWANGI (Studi tentang Hambatan dan Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan)

Oleh:

Ika Ayu Lestari¹, Leni Vitasari², Erna Agustina³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: ikaayulestari1052@gmail.com¹, lenivitasari76@gmail.com²,
erna.agustina@untag-banyuwangi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze women's participation in the Kelurahan Development Planning Meeting (Musrenbangkel) in Karangrejo Village, Banyuwangi. Using a descriptive qualitative approach, this study identifies barriers that hinder women's involvement and identifies strategies that can be taken to increase their participation. The findings show that although women's presence in the Musrenbangkel forum is becoming more visible, their level of involvement is still low, at only around 30% of the total participants. The main inhibiting factors include social and cultural norms, limited access to information, and the double burden of being both a housewife and a worker. In addition, the dominance of men in the forum and the lack of a gender-friendly facilitation approach also contributed to the low active participation of women. Based on these results, this study recommends the need for concrete actions such as the provision of accessible information, training to increase women's capacity, and the application of more inclusive facilitation methods to create spaces that encourage women's involvement in the development process at the kelurahan level.

Keywords: Women's participation, Musrenbangkel, Barriers, Empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghambat keterlibatan perempuan serta mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi mereka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keberadaan perempuan dalam forum Musrenbangkel mulai terlihat, tingkat keterlibatan mereka masih rendah, yakni hanya sekitar 30% dari keseluruhan peserta. Faktor penghambat utama meliputi norma sosial dan budaya, keterbatasan akses terhadap informasi, serta beban ganda yang harus dipikul sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja. Selain itu, dominasi laki-laki dalam forum dan kurangnya pendekatan

fasilitasi yang ramah gender turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi aktif perempuan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan nyata seperti penyediaan informasi yang mudah dijangkau, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, serta penerapan metode fasilitasi yang lebih inklusif guna menciptakan ruang yang lebih mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Partisipasi perempuan, Musrenbangkel, Hambatan, Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu cara pemerintah di semua tingkatan untuk mengkoordinasi aspirasi pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat (Ali, 2021). Musrenbang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah, termasuk di dalamnya perwakilan perempuan. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, untuk mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa hingga tingkat kabupaten atau kota adalah pertemuan masyarakat dan pemerintah terkait untuk membuat rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah (Ali, 2021). Penyelenggaraan Musrenbang Daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan atau desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten kota, dan Musrenbang Kabupaten. Beberapa undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah juga mengatur musrenbang, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Satu studi menunjukkan bahwa perwakilan perempuan cenderung mengalokasikan sumber daya secara berbeda dari laki-laki, yang menunjukkan bahwa kehadiran mereka memungkinkan

serangkaian prioritas yang berbeda untuk diungkapkan (Kabeer, 2005:11). Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan membantu mengatasi ketimpangan gender dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, keterlibatan perempuan juga menguatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan solusi yang lebih adil dan menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi.

Fraser (dalam Junin et al.: 255) menggambarkan keadilan sebagai kesetaraan partisipasi individu dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai moral yang sama bagi semua orang, menunjukkan bahwa keadilan menjadi penting dalam menyusun kerangka sosial yang memungkinkan partisipasi setara dari semua individu dalam kehidupan bersama masyarakatnya. Apabila perempuan diabaikan dalam pengambilalihan forum Musrenbang, maka prosedural perencanaan pembangunan menjadi tidak adil lantaran tidak merepresentasikan keseluruhan kebutuhan masyarakat secara lengkap. Fraser menyoroti signifikansi memberikan peluang dan sokongan kepada kelompok-kelompok marginal seperti perempuan sehingga mereka dapat berperan aktif dan berpengaruh dalam prosedural tersebut.

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel juga selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan kelima tentang kesetaraan gender. SDGs menargetkan bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat, termasuk dalam perencanaan pembangunan (UN Women-SDG 5). Hal ini bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat kehidupan politik, ekonomi, dan publik.

Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa, digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan untuk menampung aspirasi pembangunan masyarakat di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Partisipasi meningkat melalui mobilisasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan pedoman tentang Musrenbang dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan, termasuk pembahasan di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan. Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa akan menjadi tempat aspirasi masyarakat dapat disampaikan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Musrenbang dilakukan setiap tahun di tingkat kelurahan atau desa. Adapun beberapa tujuan dari Musrenbang yaitu, pertama untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan. Kedua Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas prioritas permasalahan hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang ketiga melakukan klasifikasi atas prioritas permasalahan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan yang terakhir adalah menetapkan daftar urutan prioritas permasalahan yang akan diusulkan pada forum SKPD.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) atau masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan agar potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai pelaksanaan program pembangunan. Salah satu hal penting yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, seperti yang tercermin dalam forum Musrenbang, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, serta berperan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Menurut Bappenas dalam laporan mengenai pembangunan SDM, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan (<https://www.kemenkopmk.go.id>).

Melibatkan perempuan dalam pembangunan, akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Setiap perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka kepada pemerintah kelurahan atau desa terkait apa harapan dan kebutuhan perempuan. Berdasarkan kebijakan dan pedoman berlaku, termasuk Permendagri No. 15 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah, terdapat dorongan kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan dan pedoman mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam forum perencanaan, dengan beberapa daerah menetapkan target atau persentase tertentu untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang. Sebagai contoh, beberapa inisiatif lokal atau program pemberdayaan perempuan menetapkan partisipasi perempuan minimal 30% dalam forum pengambilan keputusan, termasuk Musrenbang. Dengan berpartisipasi dalam setiap Musrenbang, perempuan memiliki kesempatan untuk memasukkan kebutuhan dan kepentingan mereka ke dalam agenda pembangunan. Peningkatan partisipasi perempuan juga berkontribusi pengurangan kesenjangan gender dan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Keterlibatan

perempuan dalam pengambilan keputusan, cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan. Langkah-langkah tersebut meliputi penyediaan pelatihan, peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender, serta penghapusan hambatan budaya dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berperan aktif.

II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan memahami konteks sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Menurut Moleong (2005:4), metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini lebih menekankan pada proses dan konteks daripada pada hasil yang dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan, seperti norma sosial, budaya, dan kebijakan yang ada. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami bagaimana perempuan menanggapi hambatan-hambatan tersebut dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam Musrenbangkel.

2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis hambatan dan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Fokus penelitian berfungsi sebagai panduan penting yang membantu peneliti tetap berada di jalur yang benar selama proses penelitian. Dengan menetapkan batasan, peneliti dapat lebih selektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga hasil penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan awal. Fokus penelitian tidak hanya membatasi cakupan penelitian tetapi juga memastikan kesinambungan antara tujuan dan hasil penelitian. Berdasarkan kerangka teori Kabeer, penelitian ini akan menganalisis peran elemen sumber daya, agensi, dan hasil yang

dicapai dalam mendorong partisipasi perempuan di Musrenbangkel. Penelitian ini juga akan menelusuri sejauh mana ketiga elemen tersebut dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk memahami situasi dan kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang akurat, valid, dan obyektif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dari bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025. Lokasi ini dipilih karena aktif melaksanakan Musrenbangkel, sehingga relevan untuk mempelajari keterlibatan perempuan.

2.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang bertujuan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Informan, atau narasumber, adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai objek penelitian dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Menurut Patton (2002:230), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kriteria seperti pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan informan dalam menyampaikan informasi yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014:178) yang menyatakan bahwa peneliti harus memilih individu yang dapat memberikan informasi yang kaya tentang fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Karangrejo, Sekretaris Lurah, serta tokoh masyarakat perempuan, termasuk ketua RT, kader posyandu, dan ketua PKK.

2.5 Sumber Data

Sumber data secara umum merujuk pada segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi atau fakta yang dibutuhkan dalam penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena berasal langsung dari sumber aslinya. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, laporan, artikel, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh pihak

lain. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh selama penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, dokumentasi, data dari media jurnal dan artikel.

2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Moleong (2018:6), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dirancang untuk menggali makna, perspektif, serta konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna memastikan keabsahan serta kekayaan informasi yang diperoleh.

2.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Menurut Moleong (2018:248), analisis data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dari data yang dikumpulkan, meliputi pengorganisasian, pengkodean, dan penafsiran untuk menemukan tema-tema yang muncul. Setelah data diorganisir dan dikodekan, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data untuk memahami makna yang lebih mendalam dari tema yang diidentifikasi. Creswell (2014:197) menekankan pentingnya menghubungkan temuan dengan konteks yang lebih luas agar analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penyajian hasil analisis dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan mudah (Sugiyono, 2017:337). Analisis data yang baik akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat (Moleong, 2018:250). Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan analisis data secara cermat agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang optimal.

2.8 Keabsahan Data

Keabsahan data adalah merujuk pada kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan kondisi nyata objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2018:270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat kriteria utama, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

2.8.1 Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan kecermatan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan membercheck. Metode ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

2.8.2 Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merupakan salah satu kriteria penting untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Agar *transferability* tercapai, peneliti perlu menyajikan deskripsi yang rinci tentang konteks penelitian, termasuk latar belakang, karakteristik partisipan, serta kondisi-kondisi yang relevan. *Transferability* dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat penerapan atau generalisasi hasil penelitian ke konteks atau populasi yang berbeda namun serupa. Konsep ini menekankan kemampuan untuk mentransfer temuan dari satu situasi ke situasi lain dengan kondisi yang sebanding.

2.8.3 Ketergantungan (*Dependability*)

Dependability menekankan konsistensi dan kestabilan data yang diperoleh. Kriteria ini memastikan bahwa proses penelitian dapat diulangi dan menghasilkan temuan yang serupa dalam kondisi yang sama, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, serta sejauh mana proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

2.8.4 Kepastian (*Confirmability*)

Confirmability memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan data yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh bias peneliti. Transparansi dalam proses penelitian dan penyediaan bukti yang mendukung temuan sangat penting untuk memastikan keandalan dan objektivitas data. Dengan kata lain, *confirmability* memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, bukan pada asumsi atau preferensi pribadi peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbangkel

a. Kehadiran dan Keaktifan Perempuan dalam Musrenbangkel

Kehadiran dan partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo masih menghadapi tantangan signifikan. Pada Musrenbangkel tahun 2025, dari 91 undangan, hanya 63 orang yang hadir, di mana hanya 19 di antaranya adalah perempuan, mencakup sekitar 30% dari total peserta. Keaktifan perempuan yang hadir juga bervariasi; sebagian berani menyampaikan pendapat, namun banyak yang memilih untuk diam. Hal ini dipengaruhi oleh norma sosial yang mendominasi, rasa kurang percaya diri, dan kurangnya informasi mengenai pentingnya peran perempuan dalam forum tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, diperlukan pendekatan inklusif, seperti penyuluhan atau pelatihan sebelum forum, serta ruang khusus untuk mendorong perempuan menyampaikan gagasan mereka. Dengan pemberdayaan yang tepat, partisipasi perempuan diharapkan dapat meningkat, menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.

b. Peran Perempuan dalam Proses Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Peran perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di Musrenbangkel sangat penting, terutama dalam isu kesejahteraan keluarga dan kebutuhan masyarakat. Meskipun beberapa perempuan, seperti perwakilan sekolah, kader posyandu, dan pengurus PKK, berusaha aktif terlibat, suara mereka sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara, terutama dalam forum yang didominasi oleh laki-laki. Pengaruh norma sosial dan budaya yang menganggap pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan oleh laki-laki masih kuat. Untuk mengoptimalkan peran perempuan, diperlukan lingkungan yang mendukung, termasuk pelatihan berbicara di depan umum dan penyuluhan tentang hak perempuan. Dengan menciptakan budaya forum yang lebih terbuka terhadap keberagaman suara, keterlibatan perempuan dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan di Kelurahan Karangrejo.

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Perempuan

a. Hambatan Sosial dan Budaya terhadap Partisipasi Perempuan

Faktor sosial dan budaya menjadi hambatan signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. Salah satu hambatan utama adalah pandangan masyarakat yang

menempatkan perempuan pada ranah domestik, sehingga banyak yang merasa bahwa ruang publik, seperti forum perencanaan pembangunan, bukanlah tempat mereka. Anggapan bahwa suara laki-laki lebih penting juga membuat perempuan ragu untuk menyampaikan pendapat, meskipun mereka memiliki gagasan yang berharga. Selain itu kurangnya kepercayaan diri menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam berpartisipasi.

b. Hambatan Informasi dan Komunikasi

Hambatan informasi dan komunikasi menjadi faktor penting yang menghalangi partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo. Banyak perempuan yang tidak mengetahui waktu dan cara berpartisipasi, bukan karena ketidaktertarikan, tetapi karena kurangnya informasi yang belum menjangkau mereka, terutama yang tidak terlibat dalam organisasi formal. Ketiadaan pelatihan atau penjelasan mengenai Musrenbangkel membuat mereka merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih ramah, seperti menyampaikan informasi melalui kelompok pengajian, posyandu, arisan, atau media sosial lokal, serta melibatkan tokoh perempuan setempat sebagai penghubung. Dengan cara ini, diharapkan perempuan merasa lebih terlibat dan berani untuk berpartisipasi dalam forum Musrenbangkel.

c. Hambatan Waktu dan Peran Ganda Perempuan

Persoalan waktu dan peran ganda yang diemban perempuan menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi mereka di Musrenbangkel Kelurahan Karangrejo. Banyak perempuan yang harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mencari penghasilan, sehingga sulit untuk hadir dalam forum yang sering diadakan pada waktu yang kurang ramah bagi jadwal mereka. Tugas domestik yang menyita energi dan waktu membuat mereka merasa tidak mungkin untuk berpartisipasi, bahkan jika ada keinginan untuk terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mempertimbangkan waktu pelaksanaan Musrenbangkel agar lebih fleksibel, seperti di akhir pekan atau malam hari, serta menyediakan fasilitas seperti tempat penitipan anak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterlibatan perempuan dapat meningkat, menjadikan proses perencanaan pembangunan lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi seluruh warga, tidak terkecuali perempuan.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Analisis Dinamika Partisipasi Perempuan dalam Musrenbangkel

Analisis dinamika partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo menunjukkan bahwa meskipun kehadiran mereka mulai terlihat, tingkat keterlibatan masih rendah. Hambatan sosial dan budaya, norma-norma gender, serta rasa ragu untuk berbicara dalam forum yang didominasi laki-laki menjadi penyebab utama. Selain itu, kurangnya akses informasi dan pemahaman tentang alur serta tujuan Musrenbangkel mengurangi kepercayaan diri perempuan untuk berkontribusi. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja juga menghambat partisipasi aktif mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana perempuan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan aspirasi, demi terwujudnya pembangunan yang lebih adil dan partisipatif. Tantangan ini mencerminkan perlunya upaya lebih untuk mendukung perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

3.3.2 Rekomendasi untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo, langkah pertama adalah menyediakan program pelatihan khusus yang mencakup proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pelatihan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, membangun jaringan dukungan melalui kelompok diskusi atau komunitas perempuan dapat memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan saling memotivasi. Menciptakan suasana forum yang inklusif dengan pengaturan waktu dan tempat yang fleksibel, serta menggunakan fasilitator yang ramah, juga penting untuk mendorong partisipasi perempuan. Peningkatan akses informasi mengenai agenda Musrenbangkel harus dilakukan melalui saluran yang jelas dan mudah dipahami, serta evaluasi terhadap partisipasi perempuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

3.4 SIMPULAN

Kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo mulai tampak, namun partisipasinya masih rendah dan belum sepenuhnya aktif, dengan hanya sekitar 30 persen peserta yang merupakan perempuan. Banyak dari mereka enggan menyampaikan pendapat, dipengaruhi oleh hambatan sosial dan budaya, kurangnya akses informasi, serta beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Suasana forum yang didominasi laki-laki dan minimnya pendekatan inklusif dari fasilitator juga memperkuat rasa enggan perempuan untuk berbicara. Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Langkah nyata diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih mendukung, melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan peningkatan kapasitas, dan pendekatan fasilitasi yang peka gender, agar perempuan merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk terlibat aktif dalam Musrenbangkel.

Saran

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel, peneliti menyarankan agar pemerintah kelurahan memperluas saluran komunikasi melalui media sosial dan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi secara efektif. Selain itu, program penyuluhan dan pelatihan khusus bagi perempuan perlu diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri mereka. Waktu pelaksanaan Musrenbangkel juga sebaiknya lebih fleksibel, seperti di akhir pekan atau malam hari, agar memudahkan kehadiran perempuan. Terakhir, panitia harus mengadopsi pendekatan inklusif dalam diskusi, dengan memberikan pengantar sebelum acara dan mendorong perempuan untuk berbicara, sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Manghayu. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5, 97.
- Aryo, W. B. (2020). Membangun Sdm Indonesia Membangun Sinergitas. *Membangun Sdm Indonesia Membangun Sinergitas*. <https://www.kemendiknas.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
- Dewi, M. O., & Marsepa, E. (2021). Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten

- Lampung Tengah Women's. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 33–37.
- Flick, U. (2018). *An Introduction To Qualitative Research*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications. Halaman 15.
- Framework, R., Women, U.-, Plan, S., Plan, S., States, M., States, M., Plan, S., Forms, A., Declaration, B., Declaration, P., Development, S., Goals, S. D., & Platform, T. B. (2021). *Theory Of Change In Support Of The Development Results Of Un- Women ' S Strategic Plan , 2018-2021*. 2018–2021.
- Junin, Y., Jegalus, N., Kosat, O., Widya, U., & Kupang, M. (2024). *Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif*. 8(5), 254–259.
- Kabir, N., & Kabir, N. (2015). *Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan : Analisis Kritis Terhadap Milenium Ketiga Tujuan Pembangunan 1 Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan : Analisis Kritis Terhadap Milenium Ketiga Tujuan Pembangunan 1*. 2074.
- Kerner, I. (2010). “ *Skala Keadilan ” Dan Tantangannya Pemerintahan Global*. 2(2), 40–50.
- Kusuma, N., Nurjannah, S., & Solikatur, S. (2023). Keterlibatan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Sapit Kecamatan Suela). *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.29303/Resiprokal.V5i1.223>
- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal Of Government Science Studies*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.30598/Jgssvol1issue1page28-37>
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 4
- Muttalib, A. (2018). Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 4(1), 250. <https://doi.org/10.58258/Jime.V4i1.545>
- Neil, T. O., & Domingo, P. (2015). The Power To Decide: Women , Decision-Making And Gender Equality. *Odi Briefing, September*, 1–8.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
- Pembangunan, P., & Desa, D. I. (2023). *Optimalisasi Keterlibatan Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Margosari*. 17(02), 67–73.
- Penghambat, F., & Pendorong, D. A. N. (2024). *Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia : Akses Perempuan Ke Arena Politik , Kesenjangan Gender Masih Menjadi Masalah Yang Signifikan Yang Berbeda (Rasyidin And Aruni 2016) . Ketidaksetaraan Yang Ada .(Rasyidin And Aruni 2016) Sistem Politik . Dengan Menyadari Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Perempuan Dalam*. 8(1).
- Putri Salsabila, S. (2024). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa. *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa*, 1. <https://www.kompasiana.com/Saniaputrisalsabila9079/65fa6b8e14709325c573d2d2/Peran-Perempuan-Dalam-Pembangunan-Bangsa>
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 367. <https://doi.org/10.29313/Mimbar.V31i2.1467>
- Tokan, F. B., Gai, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Katolik, U., & Mandira, W. (2020). *Partisipasi*

Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). 4(2), 206–225.

Widharto. (2007). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional Indonesia : Peran-Serta Pustakawan Dalam Mencerdaskan Bangsa. *Artikel Untuk “Lomba Nasional Penulisan Artikel Tentang Kepustakawanan Indonesia, 14(3&4), 152–159.*
File:///D:/Kuliah/Semester 5/Manajemen Mutu Terpadu Ung/Rujukan/Pustakawan.Pdf